

	News Title : Kemendag Terbitkan Aturan Perdagangan Aset Kripto Nasional	
	Media Name : Validnews.id	Journalist : Istimewa
	Publish Date : 01 October 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro pembinaan dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : kripto

Kemendag Terbitkan Aturan Perdagangan Aset Kripto Nasional

Pemerintah menekankan, pengaturan dimaksudkan untuk menjaga ekosistem perdagangan aset kripto sambil mendorong perkembangan ekonomi digital

Penulis: Khairul Kahfi
Editor: Fin Harini



Ilustrasi aset kripto. Shutterstock/Creastiva

JAKARTA. Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko menegaskan, pemerintah selalu mendukung pertumbuhan perdagangan aset kripto di Indonesia sebagai bagian dari ekonomi digital yang sedang berkembang. Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti mengawal perdagangan aset kripto dengan sejumlah peraturan.

"(Peraturan) sebagai upaya memberikan perlindungan kepada konsumen dan kepastian berusaha, meningkatkan investasi di dalam negeri atau mencegah *capital outflow*, meningkatkan penerimaan pajak bagi negara, mencegah kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta membuka lapangan kerja baru di bidang teknologi informasi," jelas Didid dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (30/9).

Indonesia, tambahnya, adalah salah satu negara yang mengadopsi pengaturan kripto tercepat. Bappebti memandang, pengaturan perdagangan aset kripto wajib dilakukan terkait perlindungan dana nasabah, memberikan kepastian hukum berusaha, dan memandang dinamika perdagangan aset kripto sebagai sesuatu yang baik.

Perkembangan ini dibuktikan dengan data *Gross Merchandise Value* (GMV) pada 2021, Indonesia merupakan negara teratas di ASEAN dengan nilai ekonomi digital sebesar US\$70 miliar.

Lantas Didid menggarisbawahi, kondisi pasar yang berubah-ubah merupakan sesuatu yang wajar. Pada 2021, total nilai transaksi perdagangan aset kripto mencapai Rp859,5 triliun.

"Sedangkan, total nilai transaksi (aset kripto) pada Januari-Agustus 2022 tercatat sebesar Rp249,3 triliun atau turun 56,35% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya," ungkapnya.

Di sisi lain, jumlah pelanggan aset kripto terdaftar di Indonesia sampai Agustus 2022 tercatat sebesar 16,1 juta pelanggan. Dengan rata-rata kenaikan jumlah pelanggan terdaftar sebesar 725 ribu pelanggan per bulan.

Capaian ini menunjukkan minat masyarakat untuk berinvestasi di perdagangan aset kripto terus meningkat. Sehingga, Didid menilai, Bappebti perlu mengadakan pengawasan yang baik untuk menjaga agar kondisi perdagangan aset kripto di Indonesia tetap kondusif.

Whitelist

Menurut Kepala Biro pembinaan dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Tirta Karma Senjaya, sebagai regulator lokal untuk aset kripto, Bappebti turut mengatur aset mana yang diizinkan untuk diperdagangkan dan masuk ke *whitelist*.

"Dalam menentukan aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia, Bappebti telah menetapkan peraturan bagi suatu jenis aset kripto untuk dapat diperdagangkan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka pada pasal 3," ujar Tirta.

Ketentuan yang ditetapkan adalah berbasis *distributed ledger technology*, berupa aset kripto utilitas (*utility crypto*) atau aset kripto beragun aset (*crypto backed asset*), dan telah memiliki hasil penilaian dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang ditetapkan Bappebti.

Adapun hasil penilaian dengan AHP wajib mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut, nilai kapitalisasi pasar (*market cap*), aset kripto (*coin market cap*), masuk dalam transaksi bursa aset kripto besar di dunia, memiliki manfaat ekonomi, dan telah dilakukan penilai risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

Ke depan, sinergi seluruh pemangku kepentingan harus terus terjalin demi terciptanya ekosistem perdagangan digital yang solid.

"Dengan begitu, perdagangan fisik aset kripto nantinya dapat memberikan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat dan ekonomi nasional," pungkas Tirta.